

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Apeles Lexi Lonto, Wenly Ronald Jefferson Lolong, dan Theodorus Pangalila, 2015, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Penerbit Ombak, Yogyakarta.
- Fitriani, 2020, *Sejarah Agama-Agama*, Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Sumatera Utara.
- Hotma P. Sibuea & Dwi Seno Wijanarko, 2020, *Dinamika Negara Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Depok.
- Lexy J. Moleong, 2008, *Metodologi Penelitian Kualitatif (edisi revisi)*, Remaja Rosdakarya Offset, Bandung.
- Majda El Muhtaj, 2015, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia (Dari UUD 1945 sampai dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Moh. Mahfud MD, 2019, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Depok
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Muladi, 2009, *Hak Asasi Manusia (Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat)*, Refika Aditama, Bandung.
- Nalom Kurniawan Barlyan, 2019, *Dinamika HAM dan Tanggung Jawab Negara*, Rajawali Pers, Depok.
- Ni'matul Huda, 2015, *Hukum Tata Negara Edisi Revisi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Salim, H. S. dan Erlis Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi, Edisi Pertama*, Rajawali Press, Jakarta.

- Samsul Maarif, 2017, *Pasang Surut Rekognisi Agama Leluhur Dalam Politik Agama di Indonesia*, Center for Religious and Cross-cultural Studies (CRCS), Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, 2007, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sri Ilham Nasution, 2013, *Pengantar Antropologi Agama*, Harakindo Publishing, Bandar Lampung.
- Sri Warjiyati, 2020, *Diktat Teori Perbandingan Negara Hukum*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, Surabaya.
- Tore Lindholm, W. Cole Durham Jr., Bahia G. Tahzieb-Lie, 2010, *Kebebasan Beragama Atau Berkeyakinan: Seberapa Jauh? Sebuah Referensi tentang Prinsip-Prinsip dan Praktek*, Terj. M. Rafael Edy Bosko dan M. Rifai Abduh, Kanisius, Yogyakarta.
- Zainal Arifin Mochtar, 2022, *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang*, Mojok Books, Yogyakarta.
- Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

## **Jurnal**

- Agus Pramono, 2018, Ideologi dan Politik Hukum Pancasila, *Jurnal Gema Keadilan*, 5(1): 74-83.
- Allan Fatchan Gani Wardhana, 2018, Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Warga Negara Penganut/Penghayat Kepercayaan & Gagasan Constitutional Complaint, *Jurnal Majelis Media Aspirasi Konstitusi*, 4: 99-111.
- Arif Khoiruddin, 2015, Agama dan Kebudayaan Tinjauan Studi Islam, *Jurnal Tribakti*, 26(1): 118-134.
- Aryono, 2018, Pergulatan Aliran Kepercayaan Dalam Panggung Politik Indonesia, 1950an-2010an: Romo Semono Sastrodihardjo Dan Aliran Kapribaden, *Jurnal Sejarah Cita Lekha*, 3(1): 58-68
- Bagir Manan dan Susi Dwi Harijanti, 2016, Konstitusi dan Hak Asasi Manusia, *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, 3(3): 448-467.

- Bagus Hermanto, 2019, Rekonstruksi Penguatan Eksistensi Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia Berlandaskan Pancasila dan Statuta Roma Terhadap Pengaturan Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia, *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(1): 89-106.
- Cuk Ananta Wijaya, 2006, Ilmu dan Agama Dalam Perspektif Filsafat Ilmu, *Jurnal Filsafat*, 2(2): 174-188.
- Daulat Nathanael Banjarnahor dan Firinta Togatorop, 2021, “Efektivitas Perlindungan Hak Konstitusional Penghayat Kepercayaan Parmalim Pra Dan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 97/PUU-XIV/2016”, *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 8(3): 460-467.
- Diana Tantri Cahyaningsih, 2020, Mengurai Teori Effectiveness of Law Anthony Allot, *Jurnal Rechtsvinding*.
- Fatmawati, 2011, Perlindungan Hak Atas Kebebasan Beragama dan Beribadah Dalam Negara Hukum Indonesia, *Jurnal Konstitusi*, 8(4): 489-520.
- Fauzi Iswari, 2020, Aplikasi Konsep Negara Hukum dan Demokrasi dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia, *Jurnal Cendekia Hukum*, 6(1): 127-140.
- Hufron & Hajjatulloh, 2020. Aktualisasi Negara Hukum Pancasila dalam Memberantas Komunisme di Indonesia, *Jurnal Mimbar Keadilan*, 13(1): 60-71.
- I Ketut Purwata, 2019, Efektivitas Berlakunya Hukum Berinvestasi Dalam Pemanfaatan Tanah Untuk Bisnis Pariwisata, *Jurnal Media Bina Ilmiah*, 13(8): 1415-1431.
- Kiki Muhammad Hakiki, 2011, Aliran Kebatinan di Indonesia, *Jurnal Al-AdYaN*, 6(2): 63-76.
- Kristina Viri, 2020, Dinamika Pengakuan Penghayat Kepercayaan di Indonesia, *Indonesian Journal of Religion and Society*, 2(2): 97-112.
- M. Wildan Humaidi, 2020, “Politik Hukum Mahkamah Konstitusi Atas Rekognisi Penghayat Kepercayaan Dalam Kontestasi Politik Kewargaan Indonesia”, *Jurnal Hukum Pidana & Ketatanegaraan*, 9(1): 58-80.

- Michael J. Johanis, 2014, Perlindungan Kebebasan Beragama Dalam Menjalankan Ibadahnya Menurut Perspektif Hak Asasi Manusia, *Jurnal Lex et Societatis*, 2(1): 5-14.
- Muhtadi, 2015, Politik Hukum Pengawasan Hakim Konstitusi, *Jurnal Ilmu Hukum*, 9(3): 310-330.
- Mulyadi, 2017, Agama dan Pengaruhnya dalam Kehidupan, *Jurnal Tarbiyah Al-Awlad*, 7(2): 556-564.
- Muwaffiq Jufri, 2020, Potensi Penyetaraan Agama dengan Aliran Kepercayaan di Indonesia, *Jurnal Yudisial*, 13(1): 21-36.
- Nur Sodik, 2016, Membangun Politik Hukum Responsif Perspektif Ius Constituendum, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 5(2): 233-251.
- Oki Wahyu Budijanto, 2016, Penghormatan Hak Asasi Manusia Bagi Penghayat Kepercayaan di Kota Bandung, *Jurnal Hak Asasi Manusia*, 7(1): 35-44.
- Sopiani & Zainal Mubaroq, Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasca Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(2): 146-153.
- Suhartini, 2019, Demokrasi dan Negara Hukum (Dalam Konteks Demokrasi dan Negara Hukum Indonesia), *Jurnal de Jure*, 11(1): 62-78.
- Sukirno, 2019, Politik Hukum Pengakuan Hak Atas Administrasi Kependudukan Bagi Penganut Penghayat Kepercayaan, *Administrative Law & Governance Journal*, 2(2): 268-281.
- Sunardin, 2021, Manusia Membutuhkan Agama di Masyarakat, *Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, 4(1): 1-28.
- Syafiin Mansur, 2009, Studi Sejarah Agama, *Jurnal Al-Fath*, 3(1): 18-32.
- Winarno Yudho dan Heri Tjandrasari, 1987, Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 17(1): 57-63.
- Yossa A. P. Nainggolan 2010, Hak Atas Kebebasan Beragama dan/atau Berkeyakinan: Foun Internnum Dan Forum Eksternum, *Jurnal HAM*, 6(6): 68-83.

## **Peraturan Perundang-Undangan**

ILO Convention 169 on Indigenous and Tribal Peoples 1989.

Penetapan Presiden No. 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan dan/atau Penodaan Agama.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 118 Tahun 2017 tentang Blangko Kartu Keluarga, Register Dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 27 Tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Pada Satuan Pendidikan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya).

Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik).

Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

United Nations Declaration on The Rights of Indigenous Peoples 2007.

United Nations Universal Declaration of Human Rights 1948.

### **Lain-Lain**

Adriaan Bedner, 2017, *Sempre Rubato ma non a Piacere: de Voortdurende Noodzaak van Rechtsdifferentiatie in Indonesie*.

Eko Prasetyo Danu Aji Tampubolon, 2019, *Skripsi: Implementasi Pencantuman Aliran Kepercayaan di Kolom Agama dalam Dokumen Kependudukan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 (Studi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Deli Serdang)*, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan.

Mahaarum Kusuma Pertiwi, 2021, *Disertasi: Religious Freedom and The Indonesian Constitution: A Case Study of The Blasphemy Law, Marriage Law, and Civil Administrative Law*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Moh. Wahyudi, 2018, *Tesis: Analisis Masuknya Aliran Kepercayaan di Kolom Agama dalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk; (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang Judicial Review Undang-Undang Administrasi Kependudukan)*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 140/PUU-VII/2009.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Himpunan Risalah Sidang-Sidang Dari: Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) tanggal 29 Mei 1945 – 16 Juli 1945 dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tanggal 18 dan 19 Agustus 1945 yang Berhubungan dengan Penyusunan Undang-Undang Dasar 1945.

Sucitra Indah Sari, 2018, *Skripsi: Eksistensi Penghayat Kepercayaan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 97/PUU-XIV/2016*, Universitas Negeri Semarang, Semarang.

Surat Edaran Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor: 471.14/10666/DUKCAPIL.

Tri Sutrisno, 2019, *Tesis: Implikasi Yuridis Kedudukan Aliran Kepercayaan dalam Pencatatan Administrasi Berdasarkan Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 (Studi Putusan Penerapan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016 tentang Aliran Kepercayaan dalam perspektif maqasid al-syari'ah)*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya.

Valerianus Beatae Jehanu, 2020, *Tesis: Politik Hukum Pengaturan Kepercayaan di Indonesia*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.